

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan pertanian bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan ketersediaan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, dan meningkatkan pendapatan nasional melalui ekspor produk pertanian. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan dukungan sumber daya, terutama SDM pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing, dan modern. Penyuluhan pertanian merupakan salah satu strategi yang penting dalam menghasilkan SDM pertanian yang diperlukan dalam pembangunan pertanian saat ini. Yunandar et al (2019) mengatakan bahwa penyuluhan memiliki peranan penting dalam membangun sumber daya manusia pelaku pembangunan.

Penyuluhan pada hakekatnya merupakan proses pembelajaran untuk mengubah pengetahuan, sikap, dan keterampilan sehingga meningkatkan perilaku dan kemampuan sasaran penyuluhan (Yunandar et al., 2019).

Penyuluhan pertanian merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem-subsistem yang bekerja secara sinergis dan berkesinambungan sehingga tujuan penyuluhan tercapai. Salah satu subsistem utama penyuluhan pertanian adalah kelembagaan penyuluhan, diantaranya yaitu Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat Kecamatan/distrik. BPP memiliki peran strategis karena berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, BPP merupakan pos simpul koordinasi (posko) pembangunan pertanian berbasis kawasan.

Penyuluhan pertanian adalah suatu usaha atau upaya untuk mengubah perilaku petani dan keluarganya, agar mereka mengetahui kemauan serta mampu memecahkan masalahnya sendiri dalam usaha atau kegiatan-kegiatan meningkatkan hasil usahanya dan tingkat kehidupannya. Tujuan penyuluhan pertanian mencakup tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Tujuan penyuluhan jangka panjang yaitu peningkatan taraf hidup masyarakat tani sehingga kesejahteraannya terjamin. Sedangkan tujuan penyuluhan jangka pendek yaitu menumbuhkan perubahan-perubahan dalam diri petani yang mencakup tingkat pengetahuan, kecakapan, kemampuan, sikap, dan motivasi petani terhadap

kegiatan usaha tani yang dilakukan. Tujuan pemerintah terhadap penyuluhan pertanian adalah meningkatkan produksi pangan, merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan keluarga petani beserta rakyat desa, dan mengusahakan pertanian berkelanjutan (Kartasapoetra, 1987).

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor:13/Kpts/OT.050/I/02/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Komando Strategi Pembangunan Pertanian di Kecamatan, Kostratani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian) di Kecamatan adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan melalui optimalisasi peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan pertanian.

Tugas BPP dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian dapat dilakukan antara lain dengan inovasi teknologi, sarana prasarana pertanian, peraturan perundang-undangan terkait pertanian, dan sumber daya manusia pertanian. Peran kostratani sebagai pusat data dan informasi, Pusat Gerakan pembangunan pertanian, Pusat konsultasi agribisnis, Pusat pembelajaran, dan Pusat pengembangan jejaring kemitraan (BPPSDMP, 2021).

BPP merupakan institusi pertanian terdepan di tingkat lapangan, di kecamatan, setiap BPP dibagi ke dalam wilayah-wilayah kerja penyuluh pertanian. Penguatan fungsi dan peran BPP berarti memperkokoh pembangunan pertanian. Penguatan mencakup data dan informasi, SDM, sarana prasarana dan infrastruktur (BPPSDMP, 2021).

Hal yang paling penting dalam meningkatkan produktivitas yaitu SDM pertanian. Apabila SDM pertanian berkualitas, maka produktivitas juga akan ikut meningkat. Kostratani adalah bentuk upaya untuk peningkatan BPP di tingkat kecamatan, pemberdayaan penyuluh dan petani untuk mendongkrak produktivitas pertanian. Program Strategis Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 antara lain Kostratani, KUR dan Gratieks. Kostratani yaitu optimalisasi peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang berbasis teknologi informasi. Pembangunan pertanian era 4.0 yaitu transformasi digital sektor pertanian serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital di bidang pertanian. Tantangan pertanian 4.0 yaitu peralatan pertanian analog, keterampilan memanfaatkan media, infrastruktur

telekomunikasi di pedesaan, keamanan data pertanian, manajemen big data dan integrasi data aplikasi pertanian. Tantangan tersebut akan menjadi peluang dengan menerapkan teknologi digitalisasi di sektor pertanian. Implikasi yang terjadi akibat adanya transformasi peran BPP yaitu: 1) perubahan mendasar di bidang perencanaan data dan informasi; 2) data, program, dan kegiatan ada di BPP; 3) seluruh institusi memasukan data ke website BPP/rumah data BPP; 4) perencanaan program dan kegiatan berbasis wilayah/kecamatan; 5) diperlukan dashboard koordinasi di level terbawah/kecamatan; dan BPTP sebagai sekretariat wilayah dapat berperan sebagai penganalisis program dan kegiatan pembangunan pertanian di wilayah. Kunci sukses pembangunan pertanian yaitu fokus, terpadu, sinergi, kolaborasi, data base, transparansi, tertelusur, terakses dan semua itu didukung dengan adanya teknologi informasi yang baik (Joko Samiyono, 2021).

Berdasarkan dengan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 72/Permentan/Ot.140/10/2011 Tanggal: 31 Oktober 2011 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian menyatakan bahwa penempatan Penyuluh Pertanian di desa/kelurahan ditetapkan sebagai berikut:

a) Apabila dalam satu desa terdapat lebih besar atau sama dengan 8 (delapan) kelompok tani, maka ditempatkan 1 (satu) Penyuluh Pertanian;

b) Apabila dalam satu desa terdapat kurang dari 8 (delapan) kelompok tani, maka dapat ditempatkan 1 (satu) Penyuluh Pertanian untuk membina 2 (dua) desa.

Adanya aturan ini memungkinkan terjadi variasi pelayanan bagi para penyuluh. Hal ini disebabkan kondisi lingkungan geografis, keberadaan kemampuan penyuluh dan petani, keberadaan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya dapat menjadi pembeda terhadap kondisi pelayanan penyuluh kepada petani binaannya (Miftahul Arifin, 2015).

Sesuai dengan aturan diatas, wilayah kerja BPP Kostratani Cipatujah membawahi 15 desa dengan jumlah penyuluh pertanian yang ada yaitu sebanyak 13 orang penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 orang penyuluh Tenaga Harian Lepas (THL), dan 4 orang Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS). Secara aturan bahwa jumlah penyuluh yang ada sudah cukup untuk membina seluruh petani dari lima belas desa yang ada.

Peran BPP dapat diukur melalui tingkat kepuasan kelompok tani dalam memperoleh pelayanan dari penyuluhnya. Apabila penyelenggaraan penyuluhan tersebut dilaksanakan secara benar, berkelanjutan, dan konsisten, maka tingkat kepuasan petani juga akan tinggi yang berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan petani (Miftahul Arifin, 2015).

Disamping itu secara umum terdapat informasi bahwa BPP Kecamatan Cipatujah sebagai BPP Kostratani belum sepenuhnya menerapkan 5 indikator peran BPP Kostratani dan keberadaan penyuluh pertanian belum memberikan pelayanan yang optimal bagi para petani dan kelompok tani. Hal ini juga menjadi tantangan yang cukup berat bagi penyuluh untuk melayani para petani secara optimal karena perkembangan Iptek dan era globalisasi. Dengan demikian maka pelayanan penyuluh pertanian terhadap petani binaannya perlu ditingkatkan sehingga kompetensi para petani semakin meningkat untuk menghadapi perkembangan Iptek dan pasar global. Mengingat belum pernah dilakukannya pengukuran hubungan BPP Kostratani dengan tingkat kepuasan petani padi di Kecamatan Cipatujah, maka perlu dilakukan penelitian yang dapat mengukur hubungan antara peran BPP Kostratani dengan tingkat kepuasan petani padi di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana peran BPP Kostratani Cipatujah?
2. Bagaimana tingkat kepuasan petani padi di BPP Kostratani Cipatujah?
3. Apakah ada hubungan antara peran BPP Kostratani dengan tingkat kepuasan petani padi di Kecamatan Cipatujah?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui peran BPP Kostratani Cipatujah.
2. Mengetahui tingkat kepuasan petani padi di Kecamatan Cipatujah.

3. Menganalisis hubungan antara peran BPP Kostratani dengan tingkat kepuasan petani padi di Kecamatan Cipatujah.

#### **1.4. Kegunaan/Manfaat Penelitian**

1. Bagi petani, hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kepuasan petani dan peran BPP Kostratani.
2. Bagi pemerintah atau instansi terkait, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam mengambil kebijakan mengenai peran BPP Kostratani.
3. Bagi peneliti, sebagai bahan pemikiran baru terkait hubungan peran BPP Kostratani dengan tingkat kepuasan petani padi terutama di BPP Cipatujah.
4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam melanjutkan penelitian mengenai hubungan peran BPP Kostratani dengan tingkat kepuasan petani padi di Kecamatan Cipatujah.